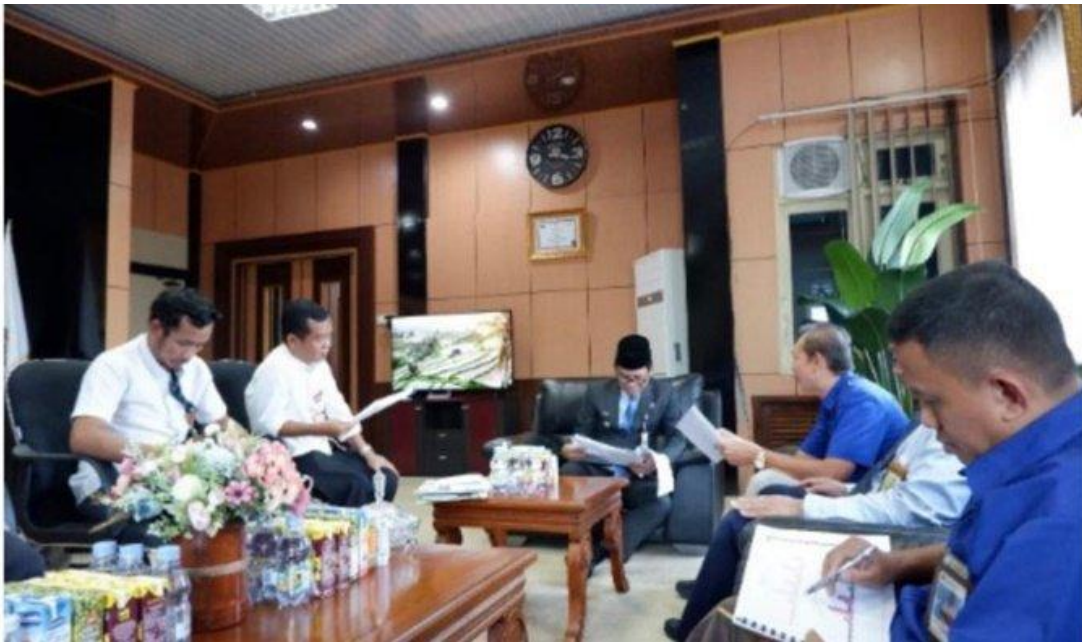


Realisasi Belanja Dana Alokasi Khusus Fisik Kabupaten Balangan Meningkat, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tanjung Berikan Rekomendasi Tambahan



Sumber gambar:

<https://cdn-2.tstatic.net/banjarmasin/foto/bank/images/Pertemuan-KPPN-Tanjung-dan-KPP-Pratama-Tanjung-dengan-Bupati-Balangan.jpg>

Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tanjung Sigid Mulyadi dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanjung beserta rombongan melakukan kunjungan ke Kantor Bupati Balangan, Rabu (01/02/2023). Kunjungan kali ini dilakukan dalam rangka silaturahmi Kepala KPPN Tanjung dengan Bupati Balangan H. Abdul Hadi, S.Ag, M.I.Kom, yang didampingi Kepala BPKAD Kabupaten Balangan beserta jajarannya.

Kepala KPPN Tanjung menyampaikan evaluasi atas kinerja pelaksanaan belanja Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2022. Khususnya untuk realisasi belanja Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik pada Pemkab Balangan, capaian kerjanya mengalami kenaikan. “Peningkatannya sebesar 0,18 persen dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 91,50 persen dari alokasi pagu tahun anggaran 2022 sebesar Rp57,59 miliar,” sebut Sigid.

Sigid lebih lanjut melaporkan, pada TA 2022 serapan belanja DAK Fisik di wilayah kerja KPPN Tanjung hanya sebesar 85,11 persen yang mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 3,9 persen. Diharapkan di tahun anggaran 2023 DAK Fisik dapat direalisasikan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan dan target yang ditentukan.

Berbeda dengan kinerja DAK Fisik, untuk penyaluran Dana Desa di wilayah kerja KPPN Tanjung tahun anggaran 2022 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yakni sebesar 0,35 persen atau meningkat menjadi 99.68 persen.

Dalam kesempatan ini pula, KPPN Tanjung berharap capaian tersebut dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan. “Kami berharap agar pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Balangan mempercepat penyaluran DAK Fisik, dengan lima rekomendasi yaitu segera melaksanakan kontrak, segera merekam data kontrak, segera mengajukan pencairan ke KPPN (SP2D BUN), segera menyalurkan dengan menerbitkan SP2D BUD, dan segera merekam data SP2D BUD,” ujar Sigid.

Percepatan pelaksanaan kontrak dapat dilakukan dengan segera melakukan percepatan proses Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) melalui lelang pra DPA berdasarkan Rencana Kegiatan dan memberikan reward terhadap SKPD yang dapat menyampaikan kontrak lebih cepat, sehingga tidak ada lagi penyampaian kontrak menjelang batas akhir yang ditetapkan.

Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya gagal lelang, penyerahan serah terima barang yang terlambat, dan adanya perubahan kebijakan pada tahun anggaran berjalan yang mengakibatkan tidak maksimalnya realisasi belanja DAK Fisik dan dapat berdampak pada pelaksanaan pembangunan.

Kepada Bupati Balangan, Kepala KPPN juga menyampaikan bahwa mulai tahun 2023, seluruh TKD untuk Balangan disalurkan melalui KPPN Tanjung. Dan sampai dengan data terakhir, KPPN Tanjung telah menyalurkan dana transfer ke RKUD Balangan sebesar Rp283,2 miliar, meliputi DBH SDA triwulan I dan DAU Januari dan Februari 2023.

Di akhir pertemuan, Kepala KPPN Tanjung berharap kepada pemda Balangan untuk terus bekerjasama dan bersinergi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di daerah melalui percepatan pelaksanaan APBD. “KPPN Tanjung siap membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas dan pengelolaan fiskal daerah, baik melalui pemberian masukan maupun sharing knowledge terkait implementasi kebijakan,” ujarnya.

Hal ini sejalan dengan penguatan peran dan fungsi instansi vertikal Kementerian Keuangan sebagai Regional Chief Economist (RCE) yang diharapkan dapat membantu Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas dan pengelolaan fiskal daerah, baik melalui instrumen APBN maupun melalui pemberian masukan yang dapat digunakan dalam perumusan kebijakan fiskal daerah.

Bupati Balangan Abdul Hadi menyambut dengan baik pertemuan yang dilakukan, dan akan memberi catatan pada rekomendasi yang disampaikan. “Kerjasama

ini diharapkan bisa terus berjalan dengan baik untuk meningkatkan pembangunan daerah Kabupaten Balangan,” ujarnya.

Pada sumber yang berbeda diberitakan bahwa evaluasi atas kinerja pelaksanaan belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2022 dilakukan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tanjung.

Sesuai dengan wilayah kerjanya, KPPN Tanjung melakukan evaluasi terhadap capaian yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tabalong, Pemerintah Kabupaten Balangan dan juga Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU).

Kepala KPPN Tanjung, Sigid Mulyadi, Selasa (17/1/2023), mengatakan, hasil evaluasi capaian kinerja realisasi belanja TKDD Tahun Anggaran 2022 telah disampaikan ke Pj Bupati HSU Suria Fadliansyah. “Kami sampailan saat lakukan kunjungan silaturahmi dengan Pj Bupati HSU,” katanya.

Menurutnya, kinerja pelaksanaan belanja TKDD Tahun Anggaran 2022, khususnya untuk realisasi belanja Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Pemkab HSU relatif rendah capaiannya, dibandingkan Pemkab Tabalong dan Pemkab Balangan, yakni 77,34 persen dari alokasi pagu Rp 65.16 miliar.

Sedangkan dalam penyaluran Dana Desa, Pemkab HSU mendapatkan predikat kinerja terbaik pertama dalam penyaluran Dana Desa se-Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), “Kami memberikan apresiasi kepada Pemkab HSU atas capaian penyaluran Dana Desa pada tahun 2022 ini diharapkan dapat dipertahankan dan terus ditingkatkan,” kata Sigit.

Ini dikarenakan, sesuai PMK-201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa di tahun 2023, bagi desa yang memenuhi kriteria akan mendapatkan alokasi tambahan Dana Desa yang paling cepat disalurkan pada Agustus 2023. “Salah satu kriteria yang dinilai adalah kinerja penyaluran Dana Desa tahun anggaran 2023,” tambahnya.

Selanjutnya, Kepala KPPN Tanjung juga berharap agar Pemkab HSU bisa mempercepat penyaluran DAK fisik. Dengan langkah pertama, lanjutnya, segera melakukan percepatan proses Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) dan tidak perlu menunggu DPA ditetapkan. Percepatan pelaksanaan revidi APIP, serta memberikan reward terhadap SKPD yang dapat menyampaikan kontrak lebih cepat, sehingga tidak ada lagi penyampaian kontrak di menjelang batas akhir yang ditetapkan.

“Semoga kejadian di tahun 2022 tidak terulang kembali, seperti adanya gagal lelang, penyerahan serah terima barang yang terlambat. Serta, adanya perubahan kebijakan pada tahun anggaran berjalan yang mengakibatkan tidak maksimalnya realisasi belanja DAK Fisik, tentunya berdampak pada pembangunan perekonomian di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara,” ucapnya.

Sementara itu, secara umum di tahun anggaran serapan belanja DAK Fisik di wilayah kerja KPPN Tanjung hanya sebesar 85.11 persen yang mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 3.99 persen. Diharapkan di tahun anggaran 2023 DAK Fisik dapat direalisasikan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan dan target yang ditentukan.

Sumber Berita

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/02/07/realisasi-belanja-dak-fisik-kabupaten-balangan-meningkat-kppn-tanjung-berikan-rekomendasi-tambahan>, Realisasi Belanja DAK Fisik Kabupaten Balangan Meningkat, KPPN Tanjung Berikan Rekomendasi Tambahan (07/02/23)
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/01/17/realisasi-dak-fisik-pemkab-hsu-capai-7734-persen-kppn-tanjung-berharap-bisa-ditingkatkan>, Realisasi DAK Fisik Pemkab HSU Capai 77,34 Persen, KPPN Tanjung Berharap Bisa Ditingkatkan (17/01/23)

Catatan:

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik

🔗 Pasal 2

Ayat (1)

DAK Fisik terdiri atas 3 (tiga) jenis, meliputi:

- a. DAK Fisik Reguler;
- b. DAK Fisik Penugasan; dan
- c. DAK Fisik Afirmasi.

Ayat (2)

DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang:

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan dan keluarga berencana;
- c. Perumahan dan pemukiman;
- d. Pertanian;
- e. Kelautan dan perikanan;
- f. Industri kecil dan menengah;

- g. Pariwisata;
- h. Jalan;
- i. Irigasi;
- j. Air minum;
- k. Sanitasi;
- l. Pasar;
- m. Energi skala kecil;
- n. Lingkungan hidup dan kehutanan; dan
- o. Transportasi.